

PENGELOLAAN ASET TETAP BERBASIS KOMPETENSI PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Meyla Ika Jayanti, Susanto Diamandjojo
Politeknik Negeri Semarang Jl. Prof Sudarto, SH Tembalang Semarang 50275
Meyla_ika@yahoo.com

Abstract

This final project aims to describe the application of fixed asset management exercised at Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonogiri based on Indonesian Government Regulation Number 24 of 2005 on Government Accounting Standards and Number 6 of 2006 on Management State/Regional-owned Assets, also Decree of the minister of labor and transmigration Number: KEP.43/MEN/III/2008 on Indonesian National Work Competence Standard, Real Estate sector, Rental and Service, other Service Businesses sub sector, Accounting Service and Taxation area, Accounting Technician sub area for Competence unit on Assets Card Management. In this final project description method is used to describe the general overview and organizational structure and exposition method is used to explain about the fixed assets management. Fixed Assets at Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonogiri year 2012 increase because of Regional Expense and Income Budgeting realization, and decrease because of being auctioned or sold. Indonesian National Work Competence Standard has been implemented and fixed assets are claimed according to their purchase value without depreciation.

Key Word: *Fixed Asset Management, Government Regulation*

Tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pengelolaan aset tetap yang terjadi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.43/MEN/III/2008 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan Sub Sektor Jasa Perusahaan Lainnya Bidang Jasa Akuntansi dan Perpajakan Sub Bidang Teknisi Akuntansi untuk Unit Kompetensi Mengelola Kartu Aset. Dalam Tugas Akhir ini metode deskripsi digunakan untuk mengetahui gambaran umum serta struktur organisasi dan metode eksposisi digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai pengelolaan aset tetap. Aset tetap pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah kabupaten Wonogiri pada tahun 2012 mengalami penambahan karena Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pengurangan karena dilelang atau dijual. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia telah diterapkan dan aset tetap diakui sesuai harga perolehan tanpa ada penyusutan.

Kata Kunci: *Pengelolaan Aset Tetap, Peraturan Pemerintah*

PENDAHULUAN

Laporan keuangan dibutuhkan oleh semua organisasi baik organisasi yang bertujuan mendapatkan laba maupun tidak, seperti lembaga pemerintahan yang membuat laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah penyajian aset yang masih cukup sulit diyakini kewajaran dan pengelolaannya. Penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai karena pengelolaan aset daerah bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Hal ini terbukti dari masih banyaknya pengecualian kewajaran atas nilai aset pemerintah daerah dalam opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam pengelolaan aset sehingga menyajikan aset daerah dengan kurang wajar.

Dalam pengelolaan aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan. Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu elemen penting sehingga dibutuhkan kompetensi kerja agar dapat mengelola dan menyajikan aset daerah dengan baik.

Menurut Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (2008:5) berdasar pada arti estimologi, kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk

melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja. Sehingga dapat dirumuskan bahwa kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan, dengan adanya kompetensi dalam bekerja diharapkan bisa menyajikan laporan keuangan yang dapat dipercaya kewajarannya

METODE

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perbandingan. Metode ini digunakan untuk membandingkan pengelolaan yang telah dilakukan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2012 dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.43/MEN/III/2008 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan Sub Sektor Jasa Perusahaan Lainnya Bidang Jasa Akuntansi dan Perpajakan Sub Bidang Teknisi Akuntansi untuk Unit Kompetensi Mengelola Kartu Aset.

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Deskripsi

Arikunto (2010:234) menyatakan bahwa "Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan." Dalam laporan Tugas Akhir ini metode deskripsi digunakan untuk

menguraikan gambaran umum mengenai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Wonogiri.

b. Metode Eksposisi

‘Penulisan eksposisi bertujuan untuk memberikan penjelasan atau informasi’ (Keraf, 2004:124). Dalam penelitian ini metode eksposisi digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai pengelolaan aset tetap berbasis kompetensi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Wonogiri. Yang dimaksud dengan pengelolaan aset tetap berbasis kompetensi adalah pengelolaan aset tetap yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk dapat dikatakan berbasis kompetensi, pengelolaan aset tetap pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Wonogiri diterapkan sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia unit kompetensi mengelola kartu aset tetap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan akuntansi diperlukan bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri agar tidak terjadi multi tafsir atas penerapan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sesuai Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 37 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Wonogiri, entitas di pemerintah Kabupaten Wonogiri terdiri atas entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

Menurut Kawedar dkk (2008:85) basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan

pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Kas Umum Negara/Kas Daerah atau entitas pelaporan, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Kas Umum Negara/Kas Daerah atau entitas pelaporan. Pada tahun 2012 DPPKAD Kabupaten Wonogiri menggunakan basis kas menuju akrual dan belum menerapkan penyusutan. Apabila telah diterapkan penyusutan, maka beban penyusutan masuk dalam Laporan Operasional sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 disebutkan bahwa aset tetap bersumber pada:

- a. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau
- b. Sumbangan berupa pemberian, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga dan sumbangan pihak lain. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 pasal 3 ayat 2, ada 10 macam pengelolaan barang milik Negara/daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan anggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

**Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk Unit Kompetensi
Mengelola Kartu Aset Tetap**

KODE UNIT : JAP.TA02.008.01

JUDUL UNIT : Mengelola Kartu Aktiva Tetap

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan keterampilan pengetahuan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola kartu aktiva tetap sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pada perusahaan.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Mempersiapkan pengelolaan kartu aset tetap	1.1. Peralatan yang dibutuhkan untuk pengelolaan kartu aset tetap disediakan 1.2. Data transaksi aset tetap disediakan
2. Mengidentifikasi data mutasi aset tetap	2.1. Saldo awal aset tetap diidentifikasi 2.2. Bukti penambahan aset tetap diidentifikasi 2.3. Bukti penghentian pemakaian aset tetap diidentifikasi 2.4. Bukti penambahan aset tetap diverifikasi 2.5. Bukti penghentian pemakaian aset tetap diverifikasi
3. Mengidentifikasi penyusutan dan akumulasi penyusutan aset tetap	3.1. Jumlah biaya penyusutan dan jumlah akumulasi penyusutan aset tetap diidentifikasi 3.2. Biaya penyusutan dan akumulasi penyusutan diverifikasi
4. Membukukan mutasi aset tetap ke kartu aset tetap	4.1. Jumlah penambahan dan penghentian aset tetap untuk setiap transaksi dibukukan 4.2. Daftar aset tetap disajikan sesuai dengan ketentuan SOP
5. Membukukan mutasi penyusutan dan akumulasi penyusutan aset tetap	5.1. Jumlah penambahan dan pengurangan penyusutan dan akumulasi penyusutan aset tetap dibukukan 5.2. Saldo penyusutan dan akumulasi penyusutan aset tetap disajikan sesuai dengan SOP

Sumber: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2008

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonogiri
Rekapitulasi Aset Tetap
31 Desember 2012

No .	Nama Aset Tetap	Saldo Awal (1 Januari 2012)		Mutasi 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012				Saldo Akhir (31 Desember 2012)	
		Jumlah Barang (Unit)	Jumlah Harga (Rp.)	Berkurang		Bertambah		Jumlah Barang (Unit)	Jumlah Harga (Rp.)
				Jumlah Barang (Unit)	Jumlah Harga (Rp.)	Jumlah Barang (Unit)	Jumlah Harga (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	TANAH	1	500.000.000	0	0	0	0	1	500.000.000
2	PERALATAN DAN MESIN	953	2.811.291.440	213	401.224.070	259	775.916.711	999	3.185.984.081
	a. Alat-alat besar	1	79.900.000	0	0	0	0	1	79.900.000
	b. Alat-alat angkutan	40	796.432.500	7	71.500.000	1	9.750.000	34	734.682.500
	c. Alat-alat bengkel	0	0	0	0	0	0	0	0
	d. Alat-alat pertanian/peternakan	0	0	0	0	0	0	0	0
	e. Alat-alat kantor dan rumah tangga	903	1.905.044.740	206	329.724.070	251	626.447.711	948	2.201.768.381
	f. Alat-alat studio dan komunikasi	9	29.914.200	0	0	6	135.919.000	15	165.833.200
	g. Alat-alat kedokteran	0	0	0	0	0	0	0	0
	h. Alat-alat laboratorium	0	0	0	0	0	0	0	0
	i. Alat-alat keamanan	0	0	0	0	1	3.800.000	1	3.800.000
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	3	556.763.350	0	0	4	911.005.730	7	1.467.769.080
	a. Bangunan dan Gedung	3	556.763.350	0	0	4	911.005.730	7	1.467.769.080
	b. Bangunan dan monumen			0	0	0	0	0	0

4	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	5	194.084.450	0	0	0	0	5	194.084.450
	a. Jalan dan Jembatan	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Bangunan air/irigasi	3	143.750.000	0	0	0	0	3	143.750.000
	c. Instalasi	1	6.601.000	0	0	0	0	1	6.601.000
	d. Jaringan	1	43.733.450	0	0	0	0	1	43.733.450
5	ASET TETAP LAINNYA	586	38.788.350	0	0	123	9.239.600	709	48.027.950
	a. Buku perpustakaan	586	38.788.350	0	0	122	5.439.600	708	44.227.950
	b. Barang bercorak kesenian/kebudayaan	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Hewan ternak dan tumbuhan	0	0	0	0	1	3.800.000	1	3.800.000
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0	0	0	0	0	0	0
	ASET LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	1.548	4.100.927.590	213	401.224.070	386	1.696.162.162.041	1.721	5.395.865.561

SIMPULAN

a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan klasifikasi aset tetap ada 6 yaitu tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; konstruksi dalam pengerjaan; dan aset tetap lainnya.

b. Aset tetap diakui apabila memenuhi syarat: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

c. Pengukuran aset tetap pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2012 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.

d. Penilaian awal aset tetap adalah tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan, sedangkan biaya perolehan untuk peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh aset tetap tersebut sampai siap pakai.

e. Perubahan aset tetap ada 2 yaitu penambahan meliputi pembelian aset tetap dan hibah/sumbangan dan pengurangan meliputi penghapusan, pemindah tanganan, penjualan dan tukar menukar.

f. Ada 2 elemen dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.43/MEN/III/2008 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang belum diterapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonogiri di tahun

2012 yaitu elemen mengidentifikasi penyusutan dan akumulasi penyusutan aset tetap dan elemen membukukan mutasi penyusutan dan akumulasi penyusutan aset tetap karena Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonogiri baru akan melakukan penyusutan aset tetap di tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

Kawendar, Warsito dkk, (2008), *Akuntansi Sektor Publik Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*, Widya Karya, Semarang.

Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Republik Indonesia, (2008). *Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.43/MEN/III/2008 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan Sub Sektor Jasa Perusahaan Lainnya Bidang Jasa Akuntansi dan Perpajakan Sub Bidang Teknisi Akuntansi*. Jakarta: Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Keraf, Gorys, (2004), *Komposisi*, Nusa Indah, ENDE Flores.

Marzuki, (2002). *Metodologi Riset*, BPFE-UII, Yogyakarta.

Narbuko, C., Abu Achmadi, (2008), *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

